BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
Alamat : Jln. Kusuma Bangsa No.6 Caile Bulukumba
Email : bawaslu.bulukumba@yahoo.com, Kode Pos 92512

Nomor : 0182 /SN-04/PM.04/VI/2020 Bulukumba, 22 Juni 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Netralitas ASN dan Polri**

Kepada Yth.

Bapak Kapolres Bulukumba

di-

Tempat

1. Dasar Hukum :
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
   b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara;
   c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri;
   d. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi;
   e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
   f. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
   g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengawasan
   h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil wali Kota Tahun 2020.
   j. Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 48/PUU-XVII/2019 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
   k. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/Pl.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020
   l. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : SS-0035/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020 Tentang Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
   m. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0298/K.Bawaslu/PM.00.00/5/2020 perihal Persiapan Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.
   n. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 0351/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2020 perihal Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19.

/_ 2. Bahwa

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,
   - Pasal 71 ayat (1) yang berbunyi : *Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara.
   - *Pasal 2 yang berbunyi :*
     Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas sebagaimana yang disebutkan pada Huruf (f) ***Netralitas;***
   - *Pasal 9 Ayat (2) yang berbunyi :*
     Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik
4. Bahwa berdasarkan Pasal 28 Ayat (1), (2), dan (3) pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri,
   1) *Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.*
   2) *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.*
   3) *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.*
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.
   - *Pasal 6 yang berbunyi :*
     Setiap Anggota Polri Wajib : Pada Huruf (h) ***Bersikap Netral Dalam Kehidupan Berpolitik;***
   - *Pasal 12 yang berbunyi :*
     Setiap Anggota Polri dilarang : Pada Huruf (c), (d) dan (e) yakni,
     c) Menjadi Anggota atau Pengurus Partai Politik;
     d) Menggunakan hak memilih dan dipilih; dan/atau
     e) Melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. *Pasal 11 yang berbunyi : Etika terhadap diri sendiri meliputi : Pada Huruf (c)* ***Menghindari Konflik Kepentingan Pribadi, Kelompok, maupun Golongan;*** Terkait dengan penjelasan ***Menghindari Konflik Kepentingan Pribadi, Kelompok, maupun Golongan*** diuraikan sebagai berikut :
   a. Bahwa PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap Partai Politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
   b. Bahwa PNS dilarang memasang Spanduk/ baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.
   c. PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon pasangan calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.
   d. Bahwa PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/ bakal pasangan calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/ atribut Partai Politik.

/_e. Bahwa

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Bulukumba

e. Bahwa PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/ foto bakal calon/ bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/ bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/ bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media social.

f. Bahwa PNS dilarang melakukan foto Bersama dengan bakal calon Kepala Darah/ Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/ Gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.

g. Bahwa PNS dilarang menjadi pembicara/ narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengawasan.
   - Pasal 4 berbunyi:
     1) *Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Netralitas Pengawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri terhadap :*
        a. *Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa Kampanye; dan*
        b. *Kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.*
     2) *Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :*
        a. *Pertemuan;*
        b. *Ajakan;*
        c. *Imbauan;*
        d. *Seruan; atau*
        e. *Pemberian barang,*

        Kepada Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam lingkungan unit kerjanya, keluarga, dan masyarakat.

8. Sehubungan dengan pelaksanaan lanjutan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, maka dihimbau kepada seluruh Anggota Polri dalam wilayah Resort Bulukumba untuk menjaga Netralitas pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 sebagaimana yang telah diuraikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA

AMBO RADDE JUNAID, SE

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Bulukumba